

RANCANGAN RENCANA KERJA

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

TAHUN 2021



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN



BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

**PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : P.8/P2SDM/SET/KEU.0/11/2020

**TENTANG
RENCANA KERJA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pencapaian target kinerja Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM pada Tahun 2021, perlu disusun Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan berpedoman pada Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2020-2024 serta mengacu pada prioritas nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021 melalui peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Kehutanan, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5099);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden No.86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/menlhk/setjen/kum.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919);
18. Keputusan Menteri LHK No. SK.333/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
19. Keputusan Menteri LHK No. SK.435/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2020 Tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021;
20. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor P.7/P2SDM/SET/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA TAHUN 2021.

Pasal 1

Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2021 merupakan kerangka kerja

dan perkiraan pembiayaan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai Tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sesuai kerangka kerja Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 maupun Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021.

Pasal 3

Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2021 ini menjadi pedoman dan dasar bagi seluruh unit kerja Eselon II dan UPT lingkup organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam menyusun rencana kerja di unit kerjanya masing-masing.

Pasal 4

Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia ini merupakan penyesuaian Sasaran dan Indikator sesuai dengan Prioritas Nasional Tahun 2021, dan di jadikan sebagai Tolak Ukur dalam pelaksanaan kegiatan dan evaluasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia di Tahun 2021.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 November 2020
KEPALA BADAN,

Ir. HELMI BASALAMAH, M.M.
NIP. 19611119 198802 1 001

PENGANTAR

KEPALA BADAN P2SDM

Penyusunan Rencana Kerja BP2SDM tahun 2021 didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Badan P2SDM Tahun 2020-2024 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yang tetap menggunakan pendekatan penganggaran berbasis program dan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Pada Tahun 2021 fokus Pemerintah yang juga dituangkan sebagai tema dalam penyusunan RKP 2021 adalah "Percepatan Pemulihan ekonomi dan Reformasi Sosial".

Pada Tahun 2020, terdapat kebijakan baru terkait restrukturisasi/redesain Program pada Kementerian/Lembaga di Indonesia, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan RI, Program pada Kementerian LHK mengalami restrukturisasi menjadi 6 (enam) program. Badan P2SDM yang sebelumnya hanya termasuk ke dalam 1 (satu) program, mulai Tahun 2021 menjadi masuk ke dalam tiga program yaitu "**Program Dukungan Manajemen**"; "**Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**" dan "**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**".

Dokumen ini merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2021 bagi Satuan Kerja di lingkup Badan P2SDM. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberi rahmat-NYA kepada kita untuk dapat bekerja dengan optimal, jujur, integritas, etos kerja, dan gotong royong.

Kepala Badan P2SDM

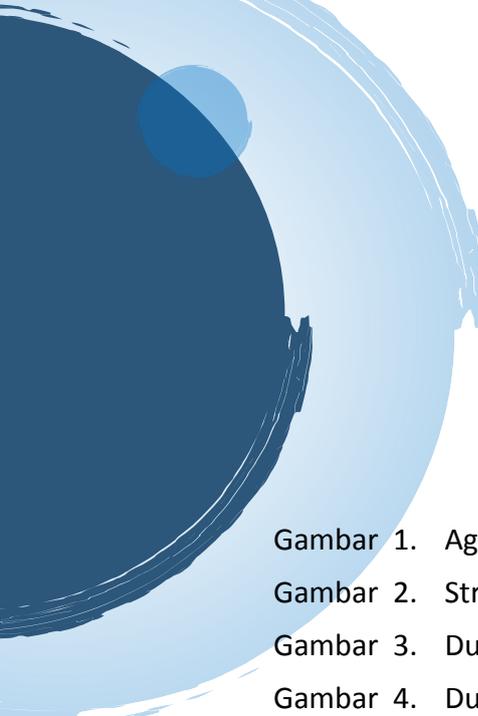
Ir. Helmi Basalamah, MM

DAFTAR ISI

	Hal
Peraturan Kepala Badan P2SDM.....	i
Pengantar Kepala Badan P2SDM	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3 Struktur Organisasi Badan P2SDM	3
1.4 Sumber Daya Manusia pada Badan P2SDM	5
1.5 Pengarusutamaan	6
II. Capaian Sasaran Program Tahun 2019 dan Prognosis Tahun 2020	8
2.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 dan Target Tahun 2020	8
2.2 Capaian Serapan Anggaran Tahun 2019 dan Prognosis Tahun 2020	14
III. Rencana Kerja Tahun 2021	18
3.1 Strategi dalam Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2021	18
3.2 Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Tahun 2021	21
3.3 Alokasi Pendanaan Badan P2SDM Tahun 2021	26
IV. Penutup	27
V. Lampiran	28
Pustaka	33

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Unit Kerja Pusat dan UPT pada Badan P2SDM	4
Tabel 2. Sumber Daya Manusia Bada P2SDM Berdasarkan Jabatan	5
Tabel 3. Pegawai ASN Badan P2SDM Berdasarkan Golongan	5
Tabel 4. Pegawai ASN Badan P2SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan	5
Tabel 5. Kegiatan Badan P2SDM dalam mendukung Prioritas Nasional	8
Tabel 6. Capaian IKP Badan P2SDM	9
Tabel 7. Capaian IKK Badan P2SDM	10
Tabel 8. Kerjasama Diklat Badan P2SDM Tahun 2019	11
Tabel 9. Target Indikator Kinerja Program (IKP) Badan P2SDM Tahun 2020	12
Tabel 10. Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Badan P2SDM Tahun 2020	13
Tabel 11. Distribusi Alokasi Anggaran Per Satker Lingkup BP2SDM	14
Tabel 12. Capaian Badan P2SDM hingga Desember 2019	15
Tabel 13. Distribusi Alokasi Anggaran Per Satker Pusat dan UPT Lingkup BP2SDM ...	16
Tabel 14. Realisasi Anggaran BP2SDM TA 2020	17
Tabel 15. Kegiatan Badan P2SDM yang Mendukung Prioritas Nasional 3	19
Tabel 16. Dukungan Badan P2SDM pada Prioritas Nasional Tahun 2020	21
Tabel 17. Sasaran Badan P2SDM Tahun 2020-2024	22
Tabel 18. Rincian Output (RO) Kegiatan Lingkup Badan P2SDM	23
Tabel 19. Target IKP Badan P2SDM Tahun 2021	24
Tabel 20. Target Rincian Output Badan P2SDM Tahun 2021	25
Tabel 21. Distribusi alokasi anggaran per satker pusat dan UPT lingkup Badan P2SDM	26



DAFTAR GAMBAR

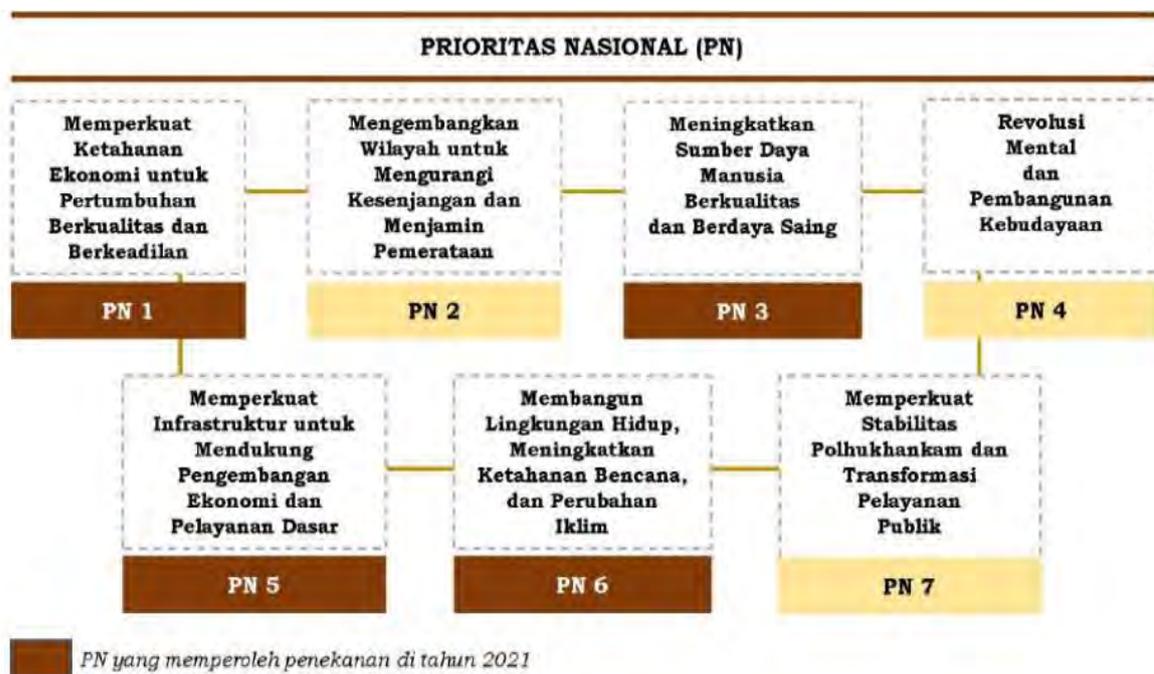
	Hal
Gambar 1. Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional	1
Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	3
Gambar 3. Dukungan BP2SDM pada Prioritas Nasional 1	18
Gambar 4. Dukungan BP2SDM pada Prioritas Nasional 3	20
Gambar 5. Dukungan BP2SDM pada Prioritas Nasional 6	20
Gambar 6. Dukungan BP2SDM pada Program Kementerian LHK	22

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sejak awal pelaksanaan tahun 2020, Indonesia dan Dunia menghadapi pandemi Novel Coronavirus-2019 (Covid-19). Pandemi ini mengakibatkan dampak yang cukup besar di masyarakat khususnya dari segi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat menurun, hal ini menyebabkan Pemerintah melakukan kebijakan atau orientasi baru dalam perencanaan pembangunan tahun 2021. Perencanaan pembangunan Indonesia pada tahun 2021 difokuskan kepada pemulihan kehidupan masyarakat sehingga perekonomian di Indonesia dapat kembali normal. Oleh sebab itu tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”.

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2021 tetap menggunakan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) dan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) dengan fokus utama pemulihan ekonomi masyarakat. Sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, ditetapkan empat pilar pembangunan nasional yang diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan/ Prioritas Nasional dimana 4 (empat) diantaranya terkait dengan Kementerian LHK. Prioritas Nasional ini kemudian dijabarkan secara lebih rinci ke dalam Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas Nasional (ProPN), dan Rincian Output Kegiatan dalam Renja.



Sumber: Dokumen Rancangan RKP 2021

GAMBAR 1. AGENDA PEMBANGUNAN / PRIORITAS NASIONAL

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kementerian LHK dan tujuan kerja Pemerintah tahun 2021, Badan P2SDM mendukung Pencapaian pada 3 (tiga) Agenda Pembangunan / Prioritas Nasional yaitu pada PN1, PN3 dan PN6 melalui 10 (sepuluh) kegiatan. Sesuai dengan tugas dan fungsi BP2SDM, fokus utama kegiatan yang dilaksanakan Badan P2SDM adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Berdasarkan arah kebijakan pembangunan tahun 2021, Pemerintah juga telah menetapkan 41 Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yang terkait langsung dengan fokus pembangunan tahun 2021, salah satunya adalah Major Project 17 Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 dimana Badan P2SDM memiliki 2 (dua) kegiatan yang mendukung proyek prioritas strategis tersebut.

Dengan mengacu pada visi misi Presiden RI dan rumusan visi misi Kementerian LHK, untuk mendukung tercapainya visi misi terbut, Badan P2SDM telah merumuskan visi dan misi serta beberapa langkah kebijakan strategis untuk mewujudkannya. Secara umum, langkah strategis yang dilakukan oleh BP2SDM antara lain melalui peningkatan peran penyuluh dan lembaga pelatihan dalam mendukung program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan serta vokasi; Revitalisasi sistem pendidikan SMK kehutanan serta pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan; Pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi LHK yang berbasis kompetensi dan daya saing; Pengembangan lembaga pelatihan dan pemagangan masyarakat berbasis usaha kehutanan dan lingkungan (komoditas); Pemantapan Sistem Administrasi dan Manajemen tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan pembangunan SDM LHK semakin berkualitas dan berdaya saing dalam mewujudkan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang berkelanjutan.

Berdasarkan visi dan misi Badan P2SDM yang telah dirumuskan, tujuan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM adalah “Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan”. Melalui tujuan ini diharapkan kualitas sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dapat semakin meningkat, inovatif, memiliki daya saing tinggi dan mampu adaptif dengan perkembangan zaman saat ini.

Dokumen Rencana Kerja Badan P2SDM tahun 2021 ini merupakan penjabaran rencana kerja Kementerian LHK Tahun 2021 dan rencana strategis Badan P2SDM Tahun 2020-2024 yang berisi rincian kegiatan dan strategi pelaksanaan yang akan dilakukan oleh Badan P2SDM untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian target pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang telah ditetapkan. Dokumen ini menjadi pedoman bagi setiap satuan kerja lingkup Badan P2SDM dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2021.

1.2 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas dan Fungsi Badan P2SDM masih mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tugas Badan P2SDM adalah menyelenggarakan

penyuluhan kehutanan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan serta memiliki fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan kehutanan, perencanaan dan standardisasi, pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengembangan generasi lingkungan;
- b. pelaksanaan penyuluhan kehutanan, perencanaan dan standardisasi, pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengembangan generasi lingkungan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan kehutanan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan, perencanaan dan standardisasi, pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengembangan generasi lingkungan;
- f. pelaksanaan administrasi Badan P2SDM; dan
- g. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI BADAN P2SDM

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM didukung oleh lima unit kerja eselon II yaitu Sekretariat Badan Penyuluhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia; Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Pusat Diklat Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Pusat Penyuluhan; dan Pusat Pelatihan masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan atau secara bagan struktur organisasi dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.



GAMBAR 2. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Badan P2SDM sebagai unsur pendukung Kementerian LHK selain didukung oleh 5 unit eselon II juga didukung oleh 12 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah yang terdiri dari 7 Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) dan 5 Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (SMKKN). Rincian lokasi dan wilayah kerja masing-masing satuan kerja tercantum pada Tabel 1 berikut.

TABEL 1. UNIT KERJA PUSAT DAN UPT PADA BADAN P2SDM

No	Satuan Kerja	Lokasi	Wilayah Kerja
A. Unit Kerja Eselon II (Pusat)			
1.	Pusat Perencanaan Pengembangan SDM	Jakarta	Seluruh Indonesia
2.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK	Bogor	Seluruh Indonesia
3.	Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	Serpong	Seluruh Indonesia
4.	Pusat Penyuluhan	Jakarta	Seluruh Indonesia
5.	Sekretariat Badan	Jakarta	Seluruh Indonesia
B. UPT Balai Diklat LHK (PerMenLHK Nomor P.16/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016)			
1.	Balai Diklat LHK Bogor	Rumpin, Jawa Barat	DKI Jakarta, Banten, Lampung, Kalimantan Barat, Bangka Belitung.
2.	Balai Diklat LHK Kadipaten	Kadipaten, Jawa Barat	Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3.	Balai Diklat LHK Pematangsiantar	Pematang Siantar, Sumatera Utara	Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat
4.	Balai Diklat LHK Pekanbaru	Pekanbaru, Riau	Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.
5.	Balai Diklat LHK Samarinda	Samarinda, Kalimantan Timur	Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara
6.	Balai Diklat LHK Makassar	Makassar, Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.
7.	Balai Diklat LHK Kupang	Kupang, Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali.
C. SMK Kehutanan Negeri (PerMenLHK Nomor P.17/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016)			
1.	SMKKN Kadipaten	Kadipaten, Jawa Barat	Provinsi di Seluruh Pulau Jawa dan Bali
2.	SMKKN Pekanbaru	Pekanbaru, Riau	Provinsi di Seluruh Pulau Sumatera
3.	SMKKN Samarinda	Samarinda, Kalimantan Timur	Provinsi di Seluruh Pulau Kalimantan
4.	SMKKN Makassar	Makassar, Sulawesi Selatan	Provinsi di Seluruh Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara dan Provinsi Maluku Utara
5.	SMKKN Manokwari	Manokwari, Papua Barat	Provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku

1.4 SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN P2SDM

Sumber daya manusia pada Badan P2SDM terdiri dari unsur pegawai atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri/PPNPN (Tenaga Kontrak) yang pada tahun 2020 (November) memiliki total 1.249 orang (887 ASN dan 362 orang tenaga kontrak) secara keseluruhan tersebar pada unit kerja Eselon II (Pusat) dan UPT lingkup Badan P2SDM dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

TABEL 2. SUMBER DAYA MANUSIA BADAN P2SDM BERDASARKAN JABATAN

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Eselon I	1
2.	Eselon II	3
3.	Eselon III	
	- Pusat	17
	- UPT (Balai Diklat LHK)	7
4.	Eselon IV	
	- Pusat	39
	- UPT (Balai Diklat LHK dan SMKK Negeri)	23
5.	Staf dan fungsional ASN	
	- Pusat	205
	- UPT (Balai Diklat LHK dan SMKK Negeri)	592
Jumlah ASN (1-6)		887
6.	PPNPN (Tenaga Kontrak)	
	- Pusat	82
	- UPT (Balai Diklat LHK dan SMKK Negeri)	280
Jumlah PPNPN (7)		362
Total Pegawai (1-7)		1.249

TABEL 3. PEGAWAI ASN BADAN P2SDM BERDASARKAN GOLONGAN

No	Golongan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah (orang)
		Pusat	UPT	Pusat	UPT	
1	Golongan IV	50	71	25	27	173
2	Golongan III	79	218	83	125	505
3	Golongan II	20	134	8	32	194
4	Golongan I	0	13	0	2	15
Jumlah		149	436	116	186	887

TABEL 4. PEGAWAI ASN BADAN P2SDM BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah (orang)
		Pusat	UPT	Pusat	UPT	
1	S3	13	14	6	4	37
2	S2	43	91	32	42	208
3	S1/D4	49	124	54	71	298
4	D3	9	11	13	14	47
5	SLTA/D1/D2	31	162	9	52	254
6	SLTP	3	21	1	1	26
7	SD	1	13	1	2	17
Jumlah		149	436	116	186	887

1.5 PENGARUSUTAMAAN

Pengarusutamaan merupakan salah satu upaya mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, sehingga dapat memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Badan P2SDM akan sepenuhnya berkomitmen untuk dapat mewujudkan kebijakan pada setiap pengarusutamaan yang dilaksanakan oleh Kementerian LHK. Empat pengarusutamaan yang menjadi kebijakan di Kementerian LHK, dimana antara satu pengarusutamaan dengan yang lainnya saling terkait dan saling mendukung yaitu:

1. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional, termasuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang saling terkait termasuk: kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. RPJMN Tahun 2020-2024 telah mengarustamakan 118 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's).

2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan KLHK bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki.

Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, yang diupayakan dengan strategi yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan, (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender, (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender, dan (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG.

Badan P2SDM sejak tahun 2015 telah aktif dalam pelaksanaan percepatan pengarusutamaan kesetaraan gender. Lembaga diklat yang ada saat ini sudah mulai menyediakan sarana prasarana yang mempertimbangkan kesetaraan gender. Saat ini Badan P2SDM juga mulai mengembangkan kriteria lembaga diklat yang responsif gender, termasuk di dalamnya metode dan kurikulum yang diperlukan dalam pelaksanaan diklat.

3. Pengarusutamaan Modal Sosial dan Budaya

Pengarusutamaan modal sosial dan budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

4. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand), dan pengelolaan big data.

Dalam hal pengarusutamaan digital, Badan P2SDM selama ini telah berupaya mengembangkan berbagai bentuk aplikasi atau sistem digital untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan kemudahan akses perolehan data melalui pengelolaan website, dan berbagai pengembangan aplikasi seperti Sistem Informasi Penyuluh (SIMLUH), Sistem Informasi Pendamping (SIMPING), serta Learning Management System (LMS) E-Learning.

II. Capaian Sasaran Program Tahun 2019 dan Prognosis Tahun 2020

2.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019 DAN TARGET TAHUN 2020

2.1.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir periode pembangunan jangka menengah Tahun 2015-2019. Badan P2SDM pada tahun 2019 mendukung 3 (tiga) Prioritas Nasional melalui 5 kegiatan yaitu pada (PN1) Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan Peningkatan pelayanan dasar; (PN3) Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya; serta (PN4) Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air.

Kegiatan Badan P2SDM yang mendukung PN1 sebanyak 5 kegiatan yaitu (1) pelatihan bagi generasi muda lingkungan hidup; (2) peningkatan kapasitas bagi tenaga pendamping Kelompok Tani Hutan (KTH); (3) peningkatan kelas bagi KTH; (4) pembentukan koperasi; dan (5) unit percontohan bagi KTH yang berada di sekitar hutan. Kegiatan-kegiatan tersebut diarahkan untuk mendorong masyarakat sekitar hutan dan KTH dapat memiliki usaha mandiri sehingga taraf hidup dan nilai ekonomi serta tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi lebih meningkat. Dukungan Badan P2SDM terhadap PN3 dilakukan melalui 2 kegiatan yaitu (1) penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (SMKKN) dan (2) peningkatan kompetensi SDM LHK melalui uji sertifikasi dan kompetensi. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan untuk membentuk lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kehutanan sehingga mereka dapat langsung berkiprah atau terlibat dalam proses pembangunan kehutanan di Indonesia. Terkait PN4, Badan P2SDM mendukung melalui tiga kegiatan peningkatan kesadaran dan kapasitas yang masing-masing memiliki 3 target masyarakat/kelompok (kader LH, generasi muda LH, anggota saka kalpataru dan saka wanabakti) agar ke depannya dapat memberikan dampak positif terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya.

TABEL 5. KEGIATAN BADAN P2SDM DALAM Mendukung Prioritas Nasional

Kegiatan Prioritas	Proyek PN	Kegiatan
PRIORITAS NASIONAL 1	Pembangunan manusia melalui	pengurangan kemiskinan dan
	Peningkatan pelayanan dasar	
Pemberian Akses	ProPN 3 – Pengelolaan	Peningkatan kapasitas tenaga
Kelola Sumber Daya	kolaboratif sumber daya hutan	pendamping/penyuluh handal bagi
Alam melalui	bersama masyarakat desa dan	KTH
Perhutanan Sosial	pengembangan usahanya	

Kegiatan Prioritas	Proyek PN	Kegiatan
	ProPN 4 – Peningkatan kapasitas institusi dan masyarakat dalam usaha perhutanan sosial	Jumlah generasi muda Lingkungan Hidup yang meningkat kapasitasnya Jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya Jumlah unit Koperasi Kelompok Tani Hutan yang dibentuk Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS)
PRIORITAS NASIONAL 3 Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya		
Penguatan Penyelenggaraan Diklat Vokasi	ProPN 3 – Pelaksanaan Diklat Vokasi	Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia
Pemantapan Sertifikasi Kompetensi	ProPN 4 – Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi	Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya
PRIORITAS NASIONAL 4 Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air		
Pecegahan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	ProPN 4 – Peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap lingkungan hidup	Jumlah kader Lingkungan hidup yang meningkat kapasitasnya Jumlah sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup Jumlah anggota saka kalpataru peduli dan berbudaya Lingkungan Hidup

Pada tahun 2019 Badan P2SDM memiliki Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Program (IKP) dan 17 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Pada pelaksanaannya terdapat tambahan dana insentif yang bersumber dari dana Bendahara Umum Negara (BUN) yang dicairkan pada triwulan III 2019 sehingga menyebabkan perubahan target pada beberapa indikator kegiatan. Berdasarkan hasil Laporan yang telah disusun, rata-rata capaian kinerja Badan P2SDM Tahun 2019 adalah 102,50%.

TABEL 6. CAPAIAN IKP BADAN P2SDM

Target IKP 2015-2019	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian
1. Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan Dalam Mendukung Pengelolaan Hutan Tingkat Tapak Dan SDM LHK Kompeten (25.400 orang).	1.497 orang	1.583 orang	105,74
2. Jumlah SDM LHK Meningkatkan Kapasitasnya (57.640 orang).	5.021 orang	5.011 orang	99,80

Target IKP 2015-2019	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian
3. Jumlah Generasi Lingkungan Meningkatkan Kapasitasnya (71.200 orang) dan 5.000 unit Sekolah/Kampus Yang Berbudaya LH.	2.500 orang	2.510 orang	100,40
	400 unit	434 unit	108,50
4. Jumlah Pelaku Utama Dan Pelaku Usaha Dalam Pemberdayaan Masyarakat Yang Meningkatkan Kapasitasnya (5.500 unit KTH dan Koperasi).	130 unit	130 unit	100,00

TABEL 7. CAPAIAN IKK BADAN P2SDM (PER BULAN NOVEMBER 2019)

Kegiatan	Sasaran / Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian
1. Perencanaan Pengembangan SDM	Tersedianya tenaga bakti rimbawan dlm mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak & SDM LHK kompeten			
	a. Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH, 15.000 orang	197 orang	197 orang	100,00
	b. Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya, 10.400 orang	1.300 orang	1.386 orang	106,62
2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur SDM LHK	Meningkatnya kapasitas SDM LHK			
	a. Jumlah Kapasitas SDM Aparatur dan non Aparatur yang meningkat kapasitasnya 35.000 orang	4.198 orang	4.190 orang	99,81
	b. Jumlah SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3), 340 orang	75 orang	75 orang	100,00
	c. Jumlah unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan, 7 unit KHDTK	7 unit	7 unit	100,00
	d. Jumlah tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan meningkat kapasitasnya 5.000 orang	300 orang	300 orang	100,00
3. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan			
	Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan, 2.300 orang	448 orang	446 orang	99,78
4. Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dan Generasi Lingkungan			
	a. Jumlah kader Lingkungan Hidup meningkat kapasitasnya, 11.200 orang	360 orang	363 orang	100,83
	b. Jumlah generasi muda LH meningkat kapasitasnya, 10.000 orang	1.360 orang	1.362 orang	100,15
	c. Jumlah sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup (adiwiyata), 5.000 unit sekolah/kampus	400 unit	434 unit	108,50
	d. Jumlah anggota saka kalpataru peduli dan berbudaya LH, 50.000 orang	780 orang	785 orang	100,64

Kegiatan	Sasaran / Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian
5. Peningkatan Penyuluhan	Meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat			
	a. Jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya, 5.000 unit KTH	110 unit	110 unit	100,00
	b. Jumlah unit koperasi KTH yang dibentuk, 500 unit	20 unit	20 unit	100,00
	c. Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS), 250 unit	20 Unit	20 unit	100,00
	d. Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masy di desa – desa hutan, 5.000 orang	200 orang	200 orang	100,00
6. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Badan P2SDM	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi birokrasi			
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: "SAKIP" dengan nilai minimal 84,00 (A)	84 Poin	82,99 Poin	98,80

Dalam rangka memenuhi kebutuhan diklat bagi SDM LHK yang lebih spesifik dari UKE I lingkup KLHK atau instansi/lembaga lain, yang tidak dapat dipenuhi oleh anggaran DIPA Badan P2SDM, maka Satker pelaksana Diklat Badan P2SDM (Pusdiklat, BDLHK) melaksanakan mekanisme kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Pada Tahun 2019, telah dilaksanakan 165 angkatan diklat (jumlah peserta 4.419 orang) yang tersebar di 7 (tujuh) Balai Diklat LHK dan Pusdiklat SDM LHK. Rincian diklat kerjasama pada masing-masing satker seperti tercantum pada Tabel 11 berikut.

Tabel 8. KERJASAMA Diklat Badan P2SDM Tahun 2019

No.	Satker	Jenis Diklat	Realisasi Peserta (orang)			
			Jumlah Angkatan	Peserta (orang)		
				L	P	Jumlah
1	PUSDIKLAT SDM LHK	50	54	1.071	175	1.246
2	BDLHK BOGOR	11	11	306	52	358
3	BDLHK KADIPATEN	19	19	523	6	529
4	BDLHK PEMATANGSIANTAR	9	9	212	44	256
5	BDLHK PEKANBARU	18	24	726	39	765
6	BDLHK SAMARINDA	14	18	445	32	477
7	BDLHK MAKASSAR	32	29	641	132	748
8	BDLHK KUPANG	1	1	26	14	40
JUMLAH		154	165	3.950	494	4.419

2.1.2 Indikator Kinerja dan Target Tahun 2020

Program Badan P2SDM pada tahun 2020 adalah PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM. Untuk mendukung keberhasilan tujuan dari sasaran tersebut terdapat 5 (lima) indikator kinerja program dan 14 (empat belas) indikator kinerja kegiatan. Akibat terjadinya pandemi Covid-19 di dunia termasuk Indonesia, terjadi perubahan postur anggaran pada Kementerian/Lembaga termasuk Kementerian LHK. Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden no.54 Tahun 2020 serta Memperhatikan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE.6/MK.02/2020 perihal *Refocusing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Menteri LHK Nomor SE.9/SETJEN/ROCAN/SET.1/3/2020 tanggal 28 Maret 2020, Presiden telah menginstruksikan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan daerah untuk melakukan *refocusing* anggaran bagi dana kesehatan, bantuan sosial (bansos), dan mendukung dunia usaha khususnya UMKM. Selain itu, dilakukan pemotongan anggaran, khususnya perjalanan dinas dan paket meeting yang tidak bisa dilaksanakan dalam kondisi pandemi ini sehingga dananya dapat direalokasikan untuk program penanganan COVID-19.

Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran yang dilakukan pada Kementerian LHK, mengakibatkan beberapa perubahan kebijakan kegiatan dan target kinerja pada Badan P2SDM. Perubahan yang signifikan terjadi pada pelaksanaan diklat serta pelatihan masyarakat serta pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara tatap muka. Untuk menghindari penyebaran Covid-19. Pelaksanaan diklat dan pelatihan masyarakat dilakukan menggunakan metode jarak jauh (*e-learning*). Perubahan metode ini mengakibatkan berubahnya target pada kegiatan diklat aparatur dan non aparatur.

Untuk menghadapi dampak pandemi pada ekonomi masyarakat, jenis diklat yang dilakukan adalah dengan menambah diklat pendamping perhutanan sosial. Diklat ini bertujuan untuk melatih pendamping penerima ijin perhutanan sosial agar dapat menjadi lebih produktif di kondisi pandemi saat ini. Selain kegiatan diklat, kegiatan lain juga dilakukan dengan mengurangi kegiatan secara tatap muka. Secara rinci target kegiatan pada Badan P2SDM setelah adanya kebijakan dalam penanganan pandemi covid-19 dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 9. TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) BADAN P2SDM TAHUN 2020

Sasaran	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target 2020
01-Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus untuk Diklat	Nilai KHDTK yang dikelola	66,5 poin
02-Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya*	11.083 Orang
	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Masyarakat*	110 Unit
	Jumlah Lembaga/ Komunitas serta Generasi Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	77 Unit

Sasaran	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target 2020
03-Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Badan P2SDM	Nilai SAKIP BP2SDM	72 Poin

*Keterangan:

1. IKP SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya dihitung berdasarkan jumlah SDM LHK yang meningkatkan kompetensinya; SDM yang mengikuti Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK; serta lulusan tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan.
2. IKP Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Masyarakat dihitung berdasarkan Jumlah KTH Mandiri dan Pembentukan LP2UKS

Untuk mencapai target pada IKP dan dukungan terhadap Prioritas Nasional pada tahun 2020, penyelenggaraan kegiatan Badan P2SDM dijabarkan menjadi 5 (lima) kegiatan utama dan 1 (satu) kegiatan dukungan manajemen yaitu:

1. Perencanaan dan Pengembangan SDM;
2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK;
3. Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan;
4. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan;
5. Peningkatan Penyuluhan;
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada Badan P2SDM.

Kegiatan tersebut dijabarkan melalui 14 indikator kinerja kegiatan sesuai dengan Tabel 10 berikut.

TABEL 10. TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) BADAN P2SDM TAHUN 2020

Kegiatan/Sasaran	Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Perencanaan dan Pengembangan SDM Tersedianya SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Kompeten	a) Peta Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK, 5 Jenis Jabatan
	b) Peta Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK, 5 Jenis Jabatan
	c) SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya, 1.000 orang
Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK Meningkatnya kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	a) SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK yang meningkatkan kapasitasnya, 9.617 Orang
	b) SDM LHK yang Lulus Pendidikan Karya Siswa, 23 orang
	c) Nilai KHDTK yang dikelola, 66,5 poin
Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan	Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan yang tersedia, 466 orang
Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Meningkatnya kapasitas masyarakat dan generasi lingkungan hidup	a) SDM Masyarakat yang mampu mengelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara lestari, 1.530 orang
	b) Lembaga/komunitas yang melaksanakan gerakan masyarakat bela lingkungan, 5 unit
	c) Sekolah yang Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup, 72 Unit

Kegiatan/Sasaran	Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Peningkatan Penyuluhan Meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat	a) Pendamping kompeten dalam pemberdayaan masyarakat melalui KTH/Kelompok Masyarakat, 200 orang
	b) Kelompok Tani Hutan (KTH) Mandiri, 120 KTH
	c) Pengembangan dan Implementasi metode dan materi penyuluhan kehutanan, 3 Jenis
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi dan birokrasi pada unit Badan P2SDM	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal, SAKIP dengan nilai 72 poin

2.2 CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2019 DAN PROGNOSIS TAHUN 2020

2.2.1 Serapan Anggaran Tahun 2019

Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM pada awal tahun 2019 didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp310.840.945.000,- dengan rincian per sumber dana RM sebesar Rp297.324.345.000,-; HLN sebesar Rp4.657.000.000,-; dan dana SBSN sebesar Rp8.859.600.000,-. Selama tahun 2019 berjalan, terdapat beberapa kali perubahan pagu pada Badan P2SDM dikarenakan terdapat tambahan dana insentif, penerimaan revisi antarprogram dan hibah pada beberapa satuan kerja. Penambahan alokasi anggaran diarahkan untuk percepatan penyelesaian kewajiban mengikuti diklat kepemimpinan (tingkat III dan IV) bagi yang sudah menjabat serta penguatan pelaksanaan program pemerintah terkait kartu pra kerja melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Alokasi Pagu akhir Badan P2SDM tahun 2019 menjadi Rp331.744.430.000,- dengan rincian alokasi per masing-masing satker lingkup Badan P2SDM dapat dilihat pada Tabel 11 berikut.

TABEL 11. DISTRIBUSI ALOKASI ANGGARAN PER SATKER LINGKUP BP2SDM

No.	Satuan Kerja	Pagu Awal (Rp)	Pagu (Rp) (Desember 2019)
A. Satuan Kerja Pusat			
1.	Sekretariat Badan P2SDM	30.315.181.000	27.651.790.000
2.	Pusat Penyuluhan	15.205.194.000	10.765.500.000
3.	Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM	10.919.500.000	17.937.664.000
4.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK	13.518.940.000	62.326.918.000
5.	Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup	52.554.509.000	14.933.940.000
B. UPT Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK)			
1.	BDLHK Bogor	10.451.745.000	14.319.820.000
2.	BDLHK Pematangsiantar	11.707.670.000	10.956.745.000
3.	BDLHK Samarinda	13.519.820.000	12.637.700.000
4.	BDLHK Makassar	21.110.600.000	16.309.118.000

No.	Satuan Kerja	Pagu Awal (Rp)	Pagu (Rp) (Desember 2019)
5.	BDLHK Pekanbaru	11.279.300.000	13.224.541.000
6.	BDLHK Kadipaten	14.992.118.000	22.423.000.000
7.	BDLHK Kupang	10.968.850.000	12.108.850.000
C. UPT SMK Kehutanan Negeri (SMKKN)			
1.	SMKKN Manokwari	18.883.635.000	15.010.425.000
2.	SMKKN Kadipaten	23.234.008.000	23.447.565.000
3.	SMKKN Makassar	17.762.551.000	19.627.718.000
4.	SMKKN Samarinda	19.491.623.000	19.015.016.000
5.	SMKKN Pekanbaru	14.925.701.000	19.048.120.000
Jumlah A + B + C		310.840.945.000	331.744.430.000

Hingga 31 Desember 2019, realisasi anggaran Badan P2SDM sudah mencapai 98,95% atau sebesar Rp328.257.497.975,-, dengan realisasi fisik mencapai 99,83%. Secara umum, kegiatan berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa kendala teknis sebagai konsekuensi dari perubahan alokasi anggaran (dana insentif dan tunjangan pegawai) yang baru diterima pada tahun berjalan. Secara rinci realisasi per satuan kerja lingkup Badan P2SDM tercantum pada Tabel 12 berikut.

TABEL 12. CAPAIAN BADAN P2SDM HINGGA DESEMBER 2019

No	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi s.d. Desember 2019		
			Rupiah	%	% Fisik
1.	Sekretariat BP2SDM	27.651.790.000	27.445.744.637	99,25	100,00
2.	Pusat Penyuluhan	10.765.500.000	10.760.445.626	99,95	100,00
3.	Pusat Renbang SDM	17.937.664.000	17.934.059.310	99,98	100,00
4.	Pusat Diklat SDM LHK	62.326.918.000	60.999.558.754	97,87	99,15
5.	Pusat Pelatihan Masyarakat dan PGL	14.933.940.000	14.933.293.491	100,00	100,00
6.	BDLHK Bogor	14.319.820.000	14.319.213.651	100,00	100,00
7.	BDLHK Pematangsiantar	10.956.745.000	10.908.619.613	99,56	100,00
8.	BDLHK Samarinda	12.637.700.000	12.617.699.302	99,84	100,00
9.	BDLHK Makassar	16.309.118.000	16.270.837.274	99,77	99,87
10.	BDLHK Pekanbaru	13.224.541.000	13.178.691.517	99,65	100,00
11.	BDLHK Kadipaten	22.423.000.000	22.337.474.354	99,62	100,00
12.	BDLHK Kupang	12.108.850.000	12.046.209.624	99,48	100,00
13.	SMKKN Manokwari	15.010.425.000	14.357.997.081	95,65	100,00
14.	SMKKN Kadipaten	23.447.565.000	23.277.339.845	99,27	100,00
15.	SMKKN Makassar	19.627.718.000	19.196.551.900	97,80	100,00
16.	SMKKN Samarinda	19.015.016.000	18.688.363.641	98,28	99,94
17.	SMKKN Pekanbaru	19.048.120.000	18.985.398.355	99,67	100,00
Jumlah A + B + C		331.744.430.000	328.257.497.975	98,95	99,83

2.2.2 Serapan Anggaran dan Prognosis Tahun 2020

Penyelenggaraan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM pada awal tahun pelaksanaan 2020 didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp341.386.089.000,-. Pada Tahun 2020 terjadi *Refocusing* dalam rangka penanganan pandemi covid-19, dimana anggaran pagu Badan P2SDM mengalami penurunan menjadi Rp276.286.386.000,-. Setelah adanya *refocusing*, terdapat kebijakan Pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sebagai upaya mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi di Masyarakat. Badan P2SDM mendapat alokasi tambahan sebesar Rp8.930.000.000,- sehingga pagu BP2SDM menjadi **Rp285.216.386.000,-**.

Tambahan anggaran tersebut dialokasikan pada satker Pusdiklat SDM LHK untuk pelaksanaan dukungan kegiatan Ketahanan Pangan Nasional Terpadu Nasional (*Food Estate*) sebesar Rp6.260.000.000,- berupa Pelatihan Agroforestry 94 angkatan @30 orang sebesar Rp6.110.000.000,- dan Pelatihan bagi Pendamping 94 orang (3 angkatan) sebesar Rp150.000.000,-; serta pada satker Pusat Penyuluhan untuk mendukung kegiatan Ketahanan Pangan Nasional Terpadu Nasional (*Food Estate*) sebesar Rp2.670.000.000,- berupa Pendampingan bagi Kelompok Tani Perhutanan Sosial dan Agroforestry.

Distribusi alokasi anggaran per satker pusat dan UPT lingkup Badan P2SDM dapat dilihat pada Tabel 13 berikut.

TABEL 13. DISTRIBUSI ALOKASI ANGGARAN PER SATKER PUSAT DAN UPT LINGKUP BADAN P2SDM

NO.	SATUAN KERJA	PAGU AWAL (RP)	PAGU AKHIR (RP)
A. Unit Kerja Pusat			
1	Kantor Pusat Badan P2SDM	71.291.095.000	57.400.454.000
a	Sekretariat Badan P2SDM	38.894.570.000	28.709.485.000
b	Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM	8.740.000.000	6.192.411.000
c	Pusat Penyuluhan	23.656.525.000	22.498.558.000
4	Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	17.531.700.000	11.663.375.000
5	Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK	45.070.484.000	40.469.312.000
B. Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK)			
6	BDLHK Pematangsiantar	12.846.640.000	11.353.440.000
7	BDLHK Pekanbaru	14.543.500.000	13.120.300.000
8	BDLHK Bogor	15.827.580.000	14.243.380.000
9	BDLHK Kadipaten	14.544.040.000	13.650.840.000
10	BDLHK Samarinda	13.180.500.000	11.603.050.000
11	BDLHK Makassar	16.475.000.000	14.637.800.000
12	BDLHK Kupang	13.925.900.000	12.986.785.000
C. Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (SMKKN)			
13	SMKKN Pekanbaru	32.131.650.000	26.846.650.000
14	SMKKN Kadipaten	20.525.000.000	15.025.000.000
15	SMKKN Samarinda	18.640.000.000	15.513.000.000
16	SMKKN Makassar	19.553.000.000	14.053.000.000
17	SMKKN Manokwari	15.300.000.000	12.650.000.000
TOTAL BP2SDM		341.386.089.000	285.216.386.000

Serapan anggaran BP2SDM hingga November 2020 adalah 82,45% atau Rp235.171.633.191,- dengan realisasi fisik sebesar 85,23% dan memiliki prognosis sampai dengan Desember 2020 sebesar 90,30% sebagaimana tabel 14 berikut.

TABEL 14. REALISASI ANGGARAN BP2SDM TA 2020 (S.D. NOVEMBER)

No	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi s.d. November 2020		
			Rupiah	%	Prognosis s.d Desember
	Badan P2SDM	285.216.386.000	235.171.633.191	82,45%	90,30%
1	Kantor Pusat Badan P2SDM	57.400.454.000	45.234.328.779	78,80%	86,15%
	<i>a Sekretariat BP2SDM</i>	<i>28.709.485.000</i>	<i>19.672.705.554</i>	<i>68,52%</i>	<i>74,32%</i>
	<i>b Pusat Penyuluhan</i>	<i>22.498.558.000</i>	<i>20.397.375.206</i>	<i>90,66%</i>	<i>99,96%</i>
	<i>c Pusat Renbang SDM</i>	<i>6.192.411.000</i>	<i>5.164.248.019</i>	<i>83,40%</i>	<i>99,99%</i>
2	Pusdiklat SDM LHK	40.469.312.000	33.645.292.940	83,14%	95,43%
3	Puslatmas dan PGL	11.663.375.000	10.545.475.173	90,42%	96,58%
4	BDLHK Bogor	14.243.380.000	12.683.273.154	89,05%	95,03%
5	BDLHK P.Siantar	11.353.440.000	10.070.606.591	88,70%	93,56%
6	BDLHK Samarinda	11.603.050.000	10.529.776.809	90,75%	96,49%
7	BDLHK Makassar	14.637.800.000	12.953.519.314	88,49%	94,18%
8	BDLHK Pekanbaru	13.120.300.000	12.030.400.774	91,69%	95,71%
9	BDLHK Kadipaten	13.650.840.000	11.983.032.595	87,78%	93,67%
10	BDLHK Kupang	12.986.785.000	12.189.354.845	93,86%	91,01%
11	SMKK N Manokwari	12.650.000.000	11.258.743.780	89,00%	94,35%
12	SMKK N Kadipaten	15.025.000.000	13.030.040.030	86,72%	97,85%
13	SMKK N Makassar	14.053.000.000	11.608.458.432	82,60%	99,35%
14	SMKK N Samarinda	15.513.000.000	13.814.046.014	89,05%	98,24%
15	SMKK N Pekanbaru	26.846.650.000	14.604.380.385	54,40%	60,69%

III. RENCANA KERJA TAHUN 2021

3.1 STRATEGI DALAM Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2021

Mengacu pada Rencana Strategis KLHK 2020-2024 terdapat empat Sasaran Strategis yang meliputi pilar ekologi, pilar ekonomi, pilar sosial tata kelola yang bertujuan untuk menyeimbangkan pembangunan nasional dan kelestarian lingkungan hidup dan hutan. Pencapaian target pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan terhadap target pembangunan nasional tahun 2021 dilaksanakan melalui empat Sasaran Strategis dan dua puluh Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim;
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing.

Badan P2SDM mendukung pencapaian sasaran strategis 4 melalui indikator kinerja utama “Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan”; “Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK”; serta “Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi”

Pada tahun 2021, agenda pembangunan / prioritas nasional masih sesuai dengan RPJMN tahun 2020-2024 yaitu 7 prioritas nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berperan dalam 4 Prioritas Nasional, yaitu

5. PN-1: Meningkatkan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
6. PN-2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
7. PN-3: Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
8. PN-6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Badan P2SDM mendukung Pencapaian pada tiga Agenda Pembangunan / Prioritas Nasional yaitu:

1. PN-1: Meningkatkan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

Pada Prioritas Nasional 1 ini, Badan P2SDM mendukung melalui 1 (satu) kegiatan dengan rincian output yaitu ***Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan***. Kegiatan ini merupakan kegiatan diklat atau pelatihan yang diberikan kepada SDM Non Aparatur yang langsung menangani tapak seperti SDM pengelola KPH. Kegiatan ini termasuk ke dalam Program Prioritas Peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Kegiatan Prioritas Pengelolaan hutan berkelanjutan serta termasuk ke dalam

Proyek Prioritas Nasional Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas SDM pengelola KPH yang langsung menangani wilayah pengelolaan.



GAMBAR 3. DUKUNGAN BP2SDM PADA PRIORITAS NASIONAL 1

2. PN-3: Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Badan P2SDM mendukung prioritas nasional ini melalui 6 (enam) kegiatan yang terbagi ke dalam dua program prioritas yaitu Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing. Secara lebih rinci kegiatan Badan P2SDM yang termasuk ke dalam PN-3 dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 15. KEGIATAN BADAN P2SDM YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL 3

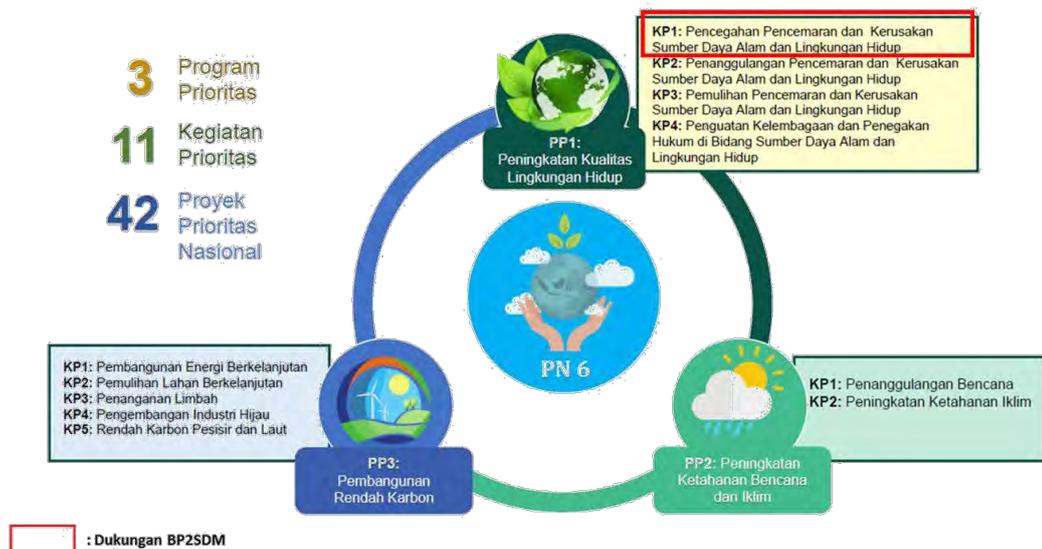
Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Rincian Output
Pengentasan Kemiskinan	Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi kelompok masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan	Kapasitas Penyuluh dan/atau pendamping yang handal
			KTH Mandiri yang terbentuk
			Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS yang terbentuk dan berkembang
Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri	Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha
			Pembangunan Prasarana Sekolah
			Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat



GAMBAR 4. DUKUNGAN BP2SDM PADA PRIORITAS NASIONAL 3

3. PN-6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Terdapat 1 (satu) kegiatan pada BP2SDM yang mendukung program prioritas ini yaitu melalui kegiatan pada peningkatan jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Kegiatan ini termasuk ke dalam Program Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Kegiatan Prioritas Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta termasuk ke dalam Proyek Prioritas Nasional Peningkatan kesadaran dan kapasitas Pemerintah, Swasta dan masyarakat terhadap Lingkungan Hidup dengan rincian output **Pembinaan Kepedulian dan Budaya Lingkungan Hidup**. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat, warga sekolah ataupun anggota lembaga/komunitas dapat lebih meningkat kesadaran dan kapasitasnya dalam menerapkan perilaku berbudaya lingkungan hidup.



GAMBAR 5. DUKUNGAN BP2SDM PADA PRIORITAS NASIONAL 6

Alokasi anggaran BP2SDM pada tahun 2021 yang khusus diarahkan untuk mendukung pencapaian 3 PN dimaksud adalah sebesar Rp94.377.079.000,-. Secara rinci, dukungan alokasi anggaran Badan P2SDM terhadap Prioritas Nasional 2021 tercantum pada Tabel 16 berikut.

TABEL 16. DUKUNGAN BADAN P2SDM PADA PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2020

No.	Prioritas Nasional	Alokasi (Rp)
1	PN1 - Meningkatkan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	4.397.579.000,-
2	PN3 - Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	87.519.500.000,-
3	PN6 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	2.460.000.000,-
TOTAL		94.377.079.000,-

3.2 PROGRAM, SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021

Pada Tahun 2020, terdapat kebijakan baru terkait restrukturisasi/redesain Program pada Kementerian LHK. Berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S.375/MK.02/2020 dan Nomor B.308/M.PPN/D/PP.04.03/05/2020 tanggal 12 Mei 2020 perihal daftar Program Kementerian/Lembaga, Program Kementerian LHK mulai Tahun 2021 mengalami restrukturisasi menjadi 6 (enam) program. Kebijakan ini juga menjadi dasar penyusunan dokumen Rencana Strategis Unit Kerja Kementerian LHK Tahun 2020-2024. Berdasarkan hasil pembahasan secara resmi bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, Badan P2SDM yang sebelumnya termasuk ke dalam satu program yaitu Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi masuk ke dalam tiga program yaitu:

1. **Program Dukungan Manajemen** dengan sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima serta Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK;
2. **Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan** dengan sasaran Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK;
3. **Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi** dengan sasaran Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) / Hutan Diklat serta Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK.

Badan P2SDM juga menjadi penanggung jawab pada Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.



GAMBAR 6. DUKUNGAN BP2SDM PADA PROGRAM KEMENTERIAN LHK

Badan P2SDM mendukung sasaran strategis 4 Kementerian LHK yaitu “Tercapainya Produktivitas dan Daya Saing SDM KLHK serta Efektivitas Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yang Baik (SS-4)”. Untuk mendukung keberhasilan tujuan dari sasaran tersebut terdapat 6 (enam) target indikator kinerja program sesuai dengan Tabel 17 berikut.

TABEL 17. SASARAN BADAN P2SDM TAHUN 2020-2024

Sasaran Strategis KLHK	Indikator Kinerja Utama KLHK	Sasaran Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Program
Tercapainya Produktivitas dan Daya Saing SDM KLHK serta Efektivitas Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yang Baik (SS-4)	Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan (IKU-13)	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) / Hutan Diklat (SP-1)	Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK / Hutan Diklat (IKP-1)
	Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM KLHK (IKU-19)	Tersertifikasinya SDM LHK yang Kompeten (SP-2)	Sertifikasi Kompetensi SDM LHK (IKP-2)
		Meningkatnya Kompetensi SDM LHK (SP-3)	Peningkatan kompetensi SDM LHK (IKP-3)
		Terbentuknya Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Masyarakat yang terakreditasi (SP-4)	Lembaga pelatihan pemagangan usaha masyarakat (IKP-4)
		Meningkatnya Jumlah Lembaga/Komunitas serta Generasi Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (SP-5)	Jumlah lembaga / komunitas serta generasi peduli dan berbudaya lingkungan hidup (IKP-5)
	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (IKU-17)	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (SP-6)	Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (IKP-6)

Untuk mencapai target sasaran dan IKP tersebut, penyelenggaraan kegiatan Badan P2SDM dijabarkan menjadi 5 (lima) kegiatan utama dan 1 (satu) kegiatan dukungan manajemen yaitu:

1. Perencanaan dan Pengembangan SDM;
2. Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK;
3. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan;
4. Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan;
5. Peningkatan Penyuluhan;
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada Badan P2SDM.

Kegiatan tersebut dijabarkan melalui 18 (delapan belas) rincian output kegiatan, secara lebih terperinci target kinerja kegiatan Badan P2SDM dapat dilihat pada lampiran dokumen ini. Rincian output (RO) Badan P2SDM telah disusun secara relevan untuk mendukung keberhasilan tercapainya setiap kegiatan dan sasaran seperti yang tercantum pada Tabel berikut.

TABEL 18. RINCIAN OUTPUT (RO) KEGIATAN LINGKUP BADAN P2SDM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Rincian Output (RO)
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
1. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BP2SDM	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik pada Badan P2SDM	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
		Layanan Dukungan Manajemen Satker
		Layanan Perkantoran
		Layanan Sarana Internal
		Layanan Prasarana Internal
2. Perencanaan Pengembangan SDM	Tersedianya SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kompeten	Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK
		Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK
		Layanan Sertifikasi dan uji kompetensi SDM LHK
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI		
3. Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK	Meningkatnya kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pelatihan SDM Aparatur LHK yang ditingkatkan
		Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan
		Karya Siswa S2 dan S3 SDM LHK
		Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha
	Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK)/Hutan Diklat	Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat
4. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan	Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan	Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Rincian Output (RO)
Kehutanan		Pengadaan Peralatan Sekolah
		Renovasi Gedung/Bangunan Sekolah
		Pembangunan Prasarana Sekolah
5. Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	Meningkatnya Kapasitas masyarakat dan generasi muda peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup	Pembinaan Kepedulian dan Budaya Lingkungan Hidup
		SDM Masyarakat yang terlatih dalam Pengelolaan lingkungan hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN		
6. Peningkatan Penyuluhan	Meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat	KTH Mandiri yang terbentuk
		Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS yang terbentuk dan berkembang
		Kapasitas penyuluh dan/atau pendamping yang handal

Target yang terdapat pada indikator kinerja program merupakan target yang akan dicapai oleh Badan P2SDM hingga Tahun 2024. Rincian besaran target IKP Badan P2SDM Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 19 berikut.

TABEL 19. TARGET IKP BADAN P2SDM TAHUN 2021

Indikator Kinerja Program (IKP)	Target 2021
Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK / Hutan Diklat (IKP-1)	67 poin
Sertifikasi Kompetensi SDM LHK (IKP-2)	1.200 orang
Peningkatan kompetensi SDM LHK (IKP-3)	2.579 orang
Lembaga pelatihan pemagangan usaha masyarakat (IKP-4)	150 unit
Jumlah lembaga / komunitas serta generasi peduli dan berbudaya lingkungan hidup (IKP-5)	365 unit
Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (IKP-6)	74 poin

*Keterangan:

1. IKP Efektivitas Pengelolaan KHDTK / Hutan Diklat dihitung melalui penilaian pengelolaan KHDTK.
2. IKP Peningkatan Kompetensi SDM LHK dihitung berdasarkan RO Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan; serta Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat.
3. IKP Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Masyarakat dihitung berdasarkan RO KTH Mandiri yang terbentuk dan Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS yang terbentuk dan berkembang.

Untuk mencapai target pada IKP tersebut sesuai dengan kebijakan baru pada tahun 2020 juga terkait redesain sistem perencanaan dan penganggaran, yaitu penyusunan rencana kerja untuk tahun 2021 harus mengikuti dan disesuaikan dengan klasifikasi rincian output yang sudah ditetapkan. Berdasarkan hasil pembahasan resmi dan mengikuti pedoman penentuan rincian output, rencana kegiatan Badan P2SDM pada Tahun 2021 seperti tercantum pada tabel berikut.

Tabel 20. Target Rincian Output Badan P2SDM Tahun 2021

Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target 2021
029.WA – Program Dukungan Manajemen			
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP2SDM	(EAC) Layanan Umum	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan
	(EAC) Layanan Umum	Layanan Dukungan Manajemen Satker	10 Layanan
	(EAA) Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	15 Layanan
	(EAD) Layanan Sarana Internal	Layanan Sarana Internal	102 Unit
	(EAE) Layanan Prasarana Internal	Layanan Prasarana Internal	4 Unit
Perencanaan dan Pengembangan SDM	(EAJ) Layanan Data dan Informasi	Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK	1 Layanan
	(EAJ) Layanan Data dan Informasi	Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	1 Layanan
	(EAF) Layanan SDM	Layanan Sertifikasi dan uji kompetensi SDM LHK	1.200 Orang
029.DL – Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi			
Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK	(DCE) Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pelatihan SDM Aparatur LHK yang ditingkatkan	900 Orang
	(SCE) Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan	2.100 Orang
	(EAM) Layanan Pelatihan dan Pendidikan Internal	Karya Siswa S2 dan S3 SDM LHK	35 Orang
	(SCE) Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha	1.500 Orang
	(CAG) Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat	7 Unit
Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	(SAE) Pendidikan Vokasi Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	479 Orang
	(RAA) Sarana Bidang Pendidikan	Pengadaan Peralatan Sekolah	4 Paket
	(RBI) Prasarana Pendidikan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	Renovasi Gedung/Bangunan Sekolah	4 Unit
Pembangunan Prasarana Sekolah		3 Unit	
Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	(QDB) Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Pembinaan Kepedulian dan Budaya Lingkungan Hidup	365 Lembaga
	(DCE) Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	SDM Masyarakat yang terlatih dalam Pengelolaan lingkungan hidup dan Kehutanan	1.530 Orang
029.FF – Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan			
Peningkatan Penyuluhan	(BDD) Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	KTH Mandiri yang terbentuk	80 unit
	(BDD) Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS yang terbentuk dan berkembang	70 unit
	(BDC) Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Kapasitas Penyuluh dan/atau pendamping yang handal	1.500 Orang

3.3 ALOKASI PENDANAAN BADAN P2SDM TAHUN 2021

Penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM pada tahun 2021 didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp313.243.965.000,- yang terbagi dalam 3 Program dengan rincian:

1. Program Dukungan Manajemen Rp196.148.655.000,-
2. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Rp8.519.500.000,-
3. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Rp108.575.810.000,-

Alokasi anggaran Badan P2SDM per sumber dana yaitu RM sebesar Rp279.984.386.000,-; PNP sebesar Rp10.000.000.000,-; HLN sebesar Rp 7.957.579.000,-; dan dana SBSN sebesar Rp15.302.000.000,-. Alokasi anggaran Badan P2SDM per jenis belanja terbagi atas belanja pegawai sebesar Rp123.182.635.000,-; belanja barang Operasional Rp43.670.195.000.000,-; dan belanja barang Non Operasional Rp146.391.135.000,-. Distribusi alokasi anggaran per satker pusat dan UPT lingkup Badan P2SDM dapat dilihat pada Tabel 23 berikut.

TABEL 21. DISTRIBUSI ALOKASI ANGGARAN PER SATKER PUSAT DAN UPT LINGKUP BADAN P2SDM

No	SATUAN KERJA	PAGU (Ribuan Rupiah)				TOTAL (Ribuan Rupiah)
		RM	PNP	HLN	SBSN	
A. Unit Kerja Pusat						
1	Kantor Pusat BP2SDM (Setbadan)	41.074.235	-	-	-	41.074.235
2	Kantor Pusat BP2SDM (Pusrenbang)	3.667.645	1.985.000	-	-	5.652.645
3	Kantor Pusat BP2SDM (Pusluh)	16.315.515	2.835.000	-	-	19.150.515
4	Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	12.594.730	279.400	-	-	12.874.130
5	Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK	25.983.211	1.860.000	7.957.579	-	35.800.790
B. Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK)						
6	BDLHK Pematangsiantar	11.257.000	440.000	-	-	11.697.000
7	BDLHK Pekanbaru	11.510.000	430.000	-	-	11.940.000
8	BDLHK Bogor	13.859.400	450.600	-	-	14.310.000
9	BDLHK Kadipaten	12.270.000	370.000	-	-	12.640.000
10	BDLHK Samarinda	12.012.000	425.000	-	-	12.437.000
11	BDLHK Makassar	13.774.000	500.000	-	-	14.274.000
12	BDLHK Kupang	11.500.000	425.000	-	-	11.925.000
C. Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (SMKKN)						
13	SMKKN Pekanbaru	19.756.650	-	-	15.302.000	35.058.650
14	SMKKN Kadipaten	20.725.000	-	-	-	20.725.000
15	SMKKN Samarinda	18.195.000	-	-	-	18.195.000
16	SMKKN Makassar	20.118.000	-	-	-	20.118.000
17	SMKKN Manokwari	15.372.000	-	-	-	15.372.000
TOTAL		279.984.386	10.000.000	7.957.579	15.302.000	313.243.965

IV. PENUTUP

Badan P2SDM KLHK menyusun rencana kerja dan kegiatan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta Agenda Pembangunan/ Prioritas Nasional. Sesuai dengan tupoksinya Badan P2SDM berfokus pada peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan, tidak hanya kepada Aparatur Sipil Negara tetapi juga SDM atau masyarakat yang bekerja/berperan dalam pembangunan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sebagai adanya kebijakan baru dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran di Kementerian/Lembaga, diperlukan penyesuaian yang cepat oleh setiap satker Badan P2SDM agar tujuan pembangunan tetap dapat tercapai. Beberapa perubahan ini juga bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas SDM LHK guna mendukung keberhasilan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dokumen perencanaan ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam pencapaian tujuan program dan kegiatan Badan P2SDM. Dokumen ini tentunya menjadi pedoman umum bagi Satker lingkup Badan P2SDM dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2021.

Dalam pelaksanaannya, seluruh elemen pelaksana program dan kegiatan Badan P2SDM diharapkan dapat bekerjasama secara optimal, efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan ketertiban dan ketaatan aturan teknis dan administrasi sehingga upaya-upaya dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dirasakan dan dipertanggungjawabkan.

V. LAMPIRAN

Matriks Rencana dan Kegiatan Tahun 2021 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Program	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target	Anggaran (ribu Rupiah)	Indikator Kinerja Kegiatan di Renstra
Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	(EAC) Layanan Umum	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	7.226.055	1. Nilai SAKIP BP2SDM 2. Level Maturitas SPIP 3. Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian LHK
		(EAC) Layanan Umum	Layanan Dukungan Manajemen Satker	10 Layanan	12.202.695	
		(EAA) Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	15 Layanan	166.852.830	
		(EAD) Layanan Sarana Internal	Layanan Sarana Internal	102 Unit	1.972.600	
		(EAE) Layanan Prasarana Internal	Layanan Prasarana Internal	4 Unit	2.939..480	
	Perencanaan dan Pengembangan SDM	(EAJ) Layanan Data dan Informasi	Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK	1 Layanan	1.100.000	Peta Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK
		(EAJ) Layanan Data dan Informasi	Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	1 Layanan	1.200.000	Peta Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK
		(EAF) Layanan SDM	Layanan Sertifikasi dan uji kompetensi SDM LHK	1.200 Orang	2.654.995	Jumlah SDM LHK Bersertifikat kompetensi
	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK	(DCE) Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pelatihan SDM Aparatur LHK yang ditingkatkan	900 Orang	12.183.231
(SCE) Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan	2.100 Orang	4.397.579	Jumlah SDM LHK di tingkat tapak yang kompeten

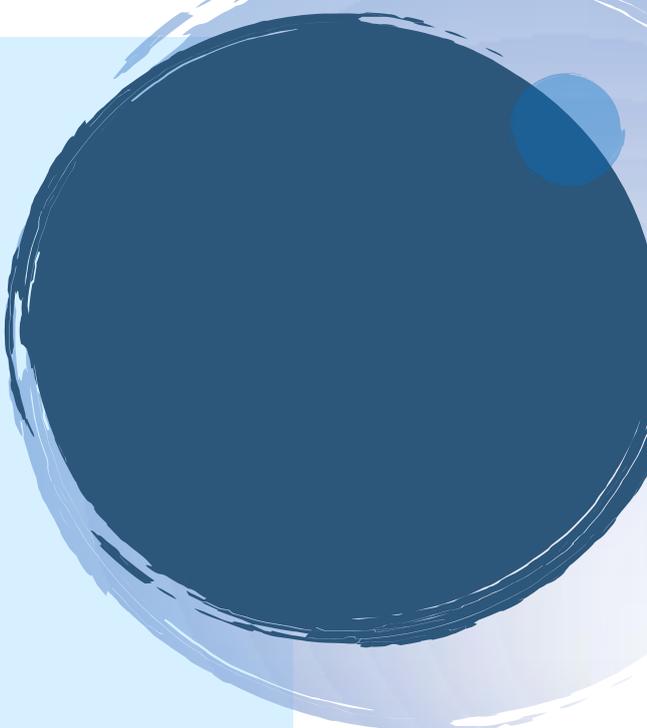
Program	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target	Anggaran (ribu Rupiah)	Indikator Kinerja Kegiatan di Renstra
		(EAM) Layanan Pelatihan dan Pendidikan Internal	Karya Siswa S2 dan S3 SDM LHK	35 Orang	2.875.000	SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa
		(SCE) Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha	1.500 Orang	3.000.000	Jumlah lulusan pelatihan vokasi bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha
		(CAG) Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat	7 Unit	4.600.000	Nilai KHDTK yang dikelola
	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	(SAE) Pendidikan Vokasi Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	479 Orang	15.302.000	Jumlah lulusan pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat
		(RAA) Sarana Bidang Pendidikan	Pengadaan Peralatan Sekolah	4 Paket	14.167.446	
		(RBI) Prasarana Pendidikan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	Renovasi Gedung/Bangunan Sekolah	4 Unit	1.594.330	
	Pembangunan Prasarana Sekolah		3 Unit	15.302.000		
	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	(QDB) Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Pembinaan Kepedulian dan Budaya Lingkungan Hidup	365 Lembaga	2.460.000	Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup

Program	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target	Anggaran (ribu Rupiah)	Indikator Kinerja Kegiatan di Renstra
		(DCE) Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	SDM Masyarakat yang terlatih dalam Pengelolaan lingkungan hidup dan Kehutanan	1.530 Orang	3.060.000	Jumlah SDM masyarakat yang terlatih, peduli dan berbudaya lingkungan hidup
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Peningkatan Penyuluhan	(BDD) Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	KTH Mandiri yang terbentuk	80 unit	2.100.000	Jumlah KTH Mandiri
		(BDD) Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS yang terbentuk dan berkembang	70 unit	2.300.000	Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat / LP2UKS (Pembentukan Wanawiyata Widyakarya)
						Pengembangan Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/ LP2UKS
(BDC) Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Kapasitas Penyuluh dan/atau pendamping yang handal	1.500 Orang	4.119.500	Jumlah penyuluh dan/atau pendamping yang handal		



PUSTAKA

1. Rencana Strategis Badan P2SDM Tahun 2020-2024;
2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021;
3. Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021;
4. Laporan Kinerja Badan P2SDM Tahun 2019;



TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA BADAN P2SDM TAHUN 2021

*Diterbitkan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Gedung Manggala Wanabhakti Blok I Lantai 14,
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan Jakarta.*

*Naskah dan tata letak disiapkan oleh Gun Gun Hidayat,
Agus Setyawan, Dita Haristyaningrum, Rizky Dwi Harsanti,
Anandita Irianti Utami dan Dede Rohman*

Editor Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

*Foto dari berbagai kondisi existing kegiatan
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.*

20

21

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM